



Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Pompanisasi dan Perluasan Areal Tanam Untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Tuban

Grace Febry Permata Putri¹, M. Kendry Widiyanto², Hasan Ismai³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v4i1.165>

CORRESPONDENCE

E-mail: tataputriid@gmail.com

KEYWORDS

Collaborative Governance, Pompanisasi, Luas Tambah Tanam (LTT), Produksi, Tanaman Pangan

ABSTRACT

Keterlibatan berbagai aktor, menunjukkan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks dan lintas sektoral. Collaborative governance diperlukan sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan publik yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu aktor tunggal. Pendekatan ini bertujuan untuk menyinergikan peran dan kontribusi berbagai pihak yang berkepentingan melalui proses partisipatif, guna mengoptimalkan program secara kolektif. Keterlibatan multi-stakeholder ini diarahkan untuk membangun sinergi dalam mendorong motivasi kolektif, meningkatkan partisipasi aktif, serta memperkuat peran masing-masing aktor dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan. Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan tercipta mekanisme tata kelola yang adaptif dan inklusif dalam menghadapi tantangan produktivitas pertanian di tengah ancaman perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Stephan Balogh (2012) sebagai kerangka analisis untuk mengukur efektivitas kolaborasi dalam pelaksanaan program pompanisasi dan perluasan areal tanam di Kabupaten Tuban. Balogh mengidentifikasi tiga indikator utama dalam menilai keberhasilan tata kelola kolaboratif, yaitu: (1) dinamika kolaborasi, yang mencakup aspek komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan ketersediaan sumber daya; (2) tindakan kolaboratif, yang meliputi upaya fasilitasi dan memajukan proses kolaborasi; serta (3) dampak dan adaptasi kolaborasi, yang berfokus pada hasil implementasi dan kemampuan adaptif terhadap perubahan. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan Sumber data yang diambil penulis berasal dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang didukung oleh data sekunder lainnya. proses kolaborasi belum berjalan optimal akibat adanya egosektoral, kesenjangan koordinasi, dan keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa prasyarat efektifitas kolaborasi masih belum terpenuhi.

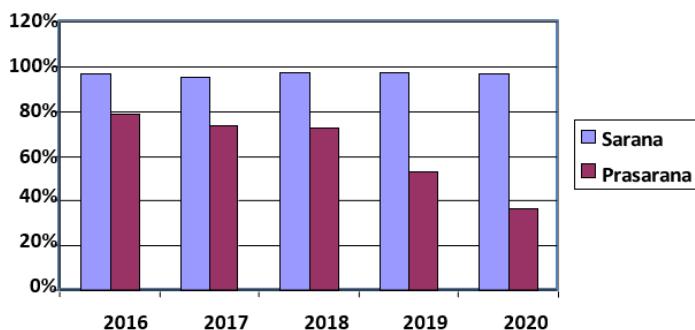
PENDAHULUAN

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik menurut Ansell dan Gash dalam (Kariem & Afrijal, 2021). Dalam proses pelaksanaan

collaborative governance bersinergi untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam proses kolaborasi dan kerjasama antar aktor dalam kegiatan pembangunan dari berbagai sektor berperan penting karena proses, tujuan dan tantangan yang akan dihadapi semakin kompleks seiring dengan berjalannya perubahan. Penduduk Kabupaten Tuban mayoritas bermata pencaharian dari bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian, Sebagian yang lainnya bermata pencaharian sebagai nelayan, perdagangan, pegawai negeri, peternak, dan wiraswasta lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban per-akhir tahun 2019, mayoritas jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Tuban berprofesi sebagai petani atau pekebun dengan jumlah sebanyak 297.611 orang. Berdasarkan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021) Tahun 2021-2026, Potensi pertanian di Kabupaten Tuban meliputi dukungan sumberdaya lahan pertanian pada tahun 2020 lahan sawah seluas 56.482 hektar, terdiri dari sawah irigasi seluas 30.376 hektar, sawah tada hujan seluas 26.054 hektar dan sawah berupa rawa lebak seluas 52 hektar.

Melalui Rencana Strategis (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, 2021) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 terdapat beberapa masalah di sektor pertanian yang dipetakan diantaranya adalah adanya potensi ancaman keberlanjutan produktivitas pertanian dan masih rendahnya peningkatan nilai tambah pada komoditas pertanian. Badan Pusat Statistik Tuban Tuban mencatat luas tanam sawah berkurang dari 106.341 hektar (2022) menjadi 102.995 hektare pada 2023. Penurunan luas tanam ini memengaruhi produksi padi dari 661.292 ton menjadi 640.547 per tahun berkurang sebebsar 20.745 ton. Oleh sebab itu pada akhir tahun 2024, pemerintah secara nasional ingin meningkatkan luas tanam, luas panen, dan produksi padi agar kembali meningkat. Tanpa terkecuali di wilayah Kabupaten Tuban. Dengan mewujudkan program swasembada pangan maka terdapat banyak bantuan dari pemerintah pusat terkait peningkatan tambah luas tanam dan produksi padi. Strategi lain untuk meningkatkan luas tanam yakni dengan memetakan di daerah mana saja ada air bawah tanah. Lalu memastikan apakah lokasi dekat sungai dan dekat bengawan. Tujuannya untuk menambah pengairan di tanah tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan berupa pompa air yang akan disebarluaskan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban.

Kenaikan jumlah produksi tanaman pangan yang tidak diiringi oleh Tingkat sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Tuban yang sifatnya fluktuatif dari tahun ke tahun menyebabkan produksi tanaman pangan mengalami hambatan. Presentase dari sarana atau prasaranan dalam keadaan baik dibagi dengan sarana atau prasarana yang dibangun atau rusak. Salah satu penyebab faktor penurunan presentase sarana dan prasarana pertanian adalah sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan lebih banyak daripada sarana dan prasarana pertanian dalam kondisi yang baik.

**Gambar 1. Diagram Perbandingan sarana dan prasarana pertanian dari 2016-2020**

Sumber : (jdih.tubankab.go.id, 2021)

Berdasarkan data tersebut, maka pengembangan di sektor pertanian di Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang memadai agar dapat baik dan lancar. Pertanian di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mencerminkan jati diri dan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Peningkatan produksi dan ketercapaian efisiensi dalam sektor pertanian juga harus diimbangi dengan perkembangan teknologi dan inovasi berbagai praktik pertanian. Dengan adanya teknologi yang modern, sektor pertanian harus beradaptasi dengan beberapa inovasi seperti sistem irigasi canggih dan penggunaan pupuk yang efektif. Data statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Tuban memberikan dampak yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah. Berdasarkan harga berlaku, perkembangan ekonomi di sektor pertanian di Kabupaten Tuban mengalami naik turun sepanjang tahun 2019-2023.

Permasalahan mendasar dari adanya peningkatan produksi tanaman pangan adalah tanah, pengairan, dan juga pupuk. Kabupaten Tuban mengalami beberapa permasalahan serius khususnya di bidang pengairan, perubahan cuaca yang tidak menentu sangat mempengaruhi produksi tanaman pangan bagi para petani khususnya di Kabupaten Tuban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban telah memetakan beberapa daerah yang termasuk dalam kategori daerah kekurangan air (kekeringan). Untuk mengatasi kekeringan di beberapa daerah dan lahan pertanian maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban secara berkala melakukan penyaluran air (Tubankab.go.id, 2024). Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban (DKP2P Kabupaten Tuban) melalui prasarana pertanian triana membenarkan adanya ratusan hektare lahan yang rusak akibat puso atau kekeringan (Hany, A D K, 2024). Hasil produksi tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh curah hujan, dan pengelolaan irigasi yang baik. Oleh sebab itu, untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tuban program pompanisasi dan perluasan areal tanam sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan hasil panen.

Ketua tim pengawasan monitoring dan evaluasi pompanisasi dan perluasan areal tanam telah melakukan peninjauan secara langsung untuk mengetahui kondisi secara riil di lapangan dan berdiskusi langsung dengan petani. Kabupaten Tuban yang sudah memasuki musim kemarau dan menyebabkan curah hujan menurun. Selain itu, masih banyak jaringan irigasi yang rusak dan banyak peralihan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu

adanya pemanfaatan alsintan ke wilayah yang sesuai dengan prosedur dan kegaitan sosialisasi kepada petani untuk menanam kembali setelah panen.

Adapun juga beberapa kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Tuban dalam program pompanisasi dan perluasan areal tanam. Program pompanisasi dan perluasan areal tanam merupakan program pemerintah pusat yang mewujudkan swasembada pangan menuju sektor pertanian yang lebih maju dan sejahtera. Sejalan dengan program pompanisasi dan perluasan areal tanam digunakan untuk meningkatkan percepatan tanam. Pemerintah Kabupaten Tuban menerima 90 unit pompa brigade yang tersebar di 20 koramil dan disalurkan ke-90 kelompok tani. Pemanfaatan alat mesin pertanian dimanfaatkan oleh Brigade tanam yang dikoordinir kodim. Oleh sebab itu, alat mesin pertanian yang dikelola oleh kodim dapat dimobilisasi dengan baik sesuai dengan keinginan dan permintaan kelompok tani di tiap wilayah (Yolency, 2024).

Untuk mengukur keberhasilan *collaborative governance* antar stakeholder dalam mengembangkan pertanian guna meningkatkan produksi tanaman pangan melalui program pompanisasi dan perluasan areal tanam di Kabupaten Tuban dapat dianalisis menggunakan teori *collaborative governance* yang diusung oleh Balogh, 2012 dalam (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020) menggunakan tiga aspek pengukuran analisis yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi dari proses kolaborasi. Berdasarkan pemaparan diatas, sebagai pertimbangan penulis untuk mengaji dan meneliti mengenai “*Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Pompanisasi dan Perluasan Areal Tanam Untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Tuban*” dalam penulisan ini peneliti menjelaskan mengenai kolaborasi yang dilaksanakan antara stakeholder yang bersangkutan dalam mendukung dan meningkatkan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tuban.

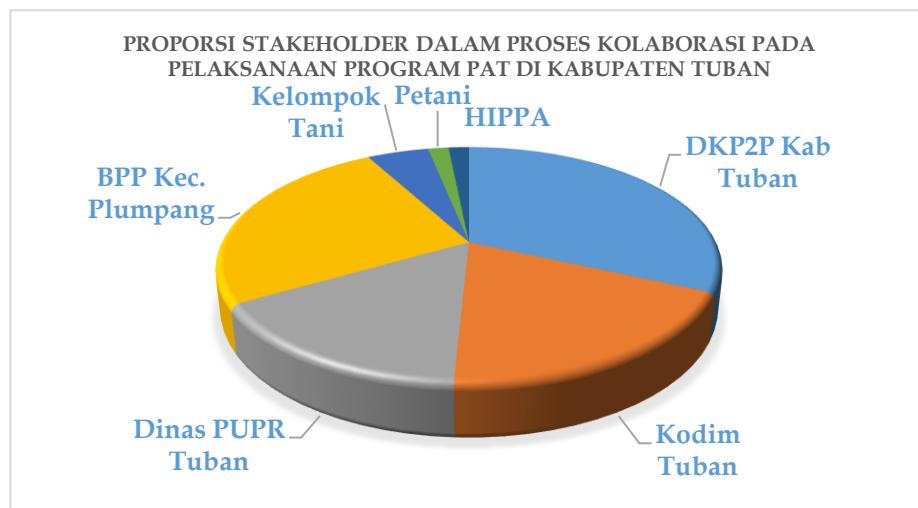
METODE

Penelitian ini melibatkan beberapa stakeholder dari proses tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan program pompanisasi dan perluasan areal tanam di Kabupaten Tuban meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban, Kodim 0811 Tuban, Dinas PUPR Kabupaten Tuban, Balai Penyuluhan Pertanian, Kelompok Tani, Petani, dan Anggota HIPPA. Fokus penelitian ditentukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses kolaborasi dalam kerangka penelitian. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan bentuk analisis tata kelola kolaboratif berbasis *Collaboration Governance Regimes* (CGRs) yang sifatnya integratif dan dinamis. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektifitas kolaborasi yang terjalin antar stakeholder melalui teori kolaborasi oleh Balogh, 2012. Proses pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dari topik yang relevan. Beberapa pihak yang dilibatkan dalam penelitian ini berfungsi untuk menguji validitas dan kepercayaan dari kebenaran sesuai dengan tujuan dalam meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya di Kabupaten Tuban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pompanisasi dan perluasan areal tanam adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah di sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memanfaatkan sumber daya air secara lebih optimal, khususnya di daerah yang tergolong tada hujan atau mengalami keterbatasan irigasi. Program ini dilaksanakan melalui pemasangan pompa air untuk mengalirkan air dari sumber seperti sungai, embung, atau sumur dangkal ke lahan pertanian, sehingga memungkinkan penanaman di luar musim hujan dan memperluas cakupan lahan tanam. Dalam konteks ketahanan pangan nasional, pompanisasi berfungsi untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), menambah frekuensi musim tanam, serta mengurangi ketergantungan petani terhadap siklus alam. Selain aspek teknis, program ini juga mencakup aspek sosial dan kelembagaan, karena pelaksanaannya melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta pihak swasta. Dengan demikian, pompanisasi tidak hanya menjadi upaya teknologis, tetapi juga merupakan strategi kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya air dan lahan secara berkelanjutan.

Dalam penerapan program pompanisasi dan perluasan areal tanam bermula pada adanya dampak alam dari El Nino yang mengancam hampir seluruh daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Tuban. El Nino adalah fenomena alam yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, serta mempengaruhi pola cuaca secara global. Untuk mengatasi dampak alam yang terjadi di Kabupaten Tuban, tentunya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban mencari alternatif solusi yang akan digunakan untuk menekan adanya kondisi penurunan produksi tanaman pangan. penurunan produksi padi di Kabupaten Tuban menurun sebesar 20.745 ton atau sekitar 3,14%, dari 661.292 ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2022 menjadi 640.547 ton GKG pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh keterlambatan waktu tanam akibat kekeringan yang dipicu oleh El Niño. Sebagian besar sistem pertanian di Tuban bergantung pada lahan tada hujan, sehingga sangat rentan terhadap perubahan pola curah hujan. Kekeringan ekstrem yang terjadi memperparah kondisi ini, mengakibatkan keterbatasan sumber air untuk irigasi. Fenomena El Niño menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan intens, mengakibatkan kekeringan ekstrem di wilayah Tuban. adapun juga proporsi dari masing-masing stakeholder dalam proses kolaborasi pada pelaksanaan program pompanisasi dan perluasn areal tanam di Kabupaten Tuban yang disajikan oleh penulis sebagai berikut:

**Gambar 2. Diagram penyajian proporsi stakeholder dalam proses kolaborasi**

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2025

Dalam proporsi stakeholder yang digambarkan oleh peneliti ini menjelaskan bahwa proses kolaborasi hanya didominasi oleh beberapa stakeholder level atas sehingga stakeholder yang menjadi sasaran belum bisa berpartisipasi secara optimal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kolaborasi masih belum berjalan dengan baik, karena adanya egosektoral yang mendominasi dari adanya proses kolaborasi. Hal ini berdampak pada ketersediaan air bersih dan kebutuhan irigasi pertanian. Tabel berikut menyajikan analisis tentang bagaimana pelaksanaan program pompanisasi dan perluasan areal tanam di Kabupaten Tuban menggunakan teori kolaboratif:

Tabel 1. Analisis Kolaborasi Dalam Pelaksaaan Program Pompanisasi Dan Perluasan Areal Tanam di Kabupaten Tuban

Aspek	Temuan Penelitian	Analisis	Dampak
Dinamik a Kolaborasi	Dalam pelaksanaan program PAT mengalami ketimpangan di level bawah. Stakeholder sasaran (petani) tidak pernah mengetahui dan memahami keberadaan program PAT ini.	Mengacu pada Balogh, menjelaskan bahwa dinamika kolaborasi yang ideal dapat dilihat melalui komunikasi yang baik dan lancar; kepercayaan antar stakeholder; komitmen yang kuat, dan sumberdaya yang memadai. Kolaborasi dalam pelaksanaan program berjalan lancar antar pemerintah, namun berbeda halnya dengan stakeholder sasaran yakni petani yang masih belum merasakan manfaat secara optimal karena banyak terjadi miskomunikasi, kurangnya kepercayaan dg pemerintah, dan sumber daya yang relatif terbatas.	Pelaksanaan program hanya difokuskan pada beberapa sisi saja sehingga tidak memberikan hasil yang optimal, akibat dari adanya keterbatasan memberikan dampak yang tidak merata sehingga menimbulkan beberapa kesenjangan.
Tindakan -tindakan Kolaborasi	Fasilitasi program dinilai baik oleh pemerintah, implementasinya belum sepenuhnya tepat	Walaupun pemerintah menganggap proses fasilitasi program telah berjalan secara optimal, pelaksanaannya di lapangan masih belum	Menurunnya kepercayaan petani terhadap pemerintah mendorong munculnya inisiatif individual, namun keterbatasan kapasitas SDM membuat

	sasaran karena kurangnya informasi di tingkat petani. Kolaborasi yang terbangun pun masih didominasi aktor level atas, sehingga prinsip inklusivitas dalam collaborative governance belum optimal.	menyentuh sasaran utama karena informasi belum menjangkau petani secara merata. Dalam perspektif teori kolaborasi Stephen Balogh, kondisi ini mencerminkan lemahnya integrasi antar-level aktor, di mana kolaborasi hanya terjadi di tingkat elit tanpa melibatkan aktor akar rumput secara efektif, sehingga menghambat terciptanya sinergi yang inklusif.	produktivitas tetap rendah. Lemahnya koordinasi juga memunculkan kelompok-kelompok yang bersifat individualistik dan oportunistik, yang bertengangan dengan prinsip kolaborasi dalam tata kelola pertanian.
Dampak dan Adaptasi Proses Kolaborasi	Peningkatan luas tanam, panen, dan produksi lebih banyak didorong oleh peran stakeholder level atas, sementara sebagian besar petani tidak memahami proses yang berlangsung. Ini menunjukkan kolaborasi yang belum partisipatif dan cenderung eksklusif dalam praktiknya.	Peningkatan output program mencerminkan keberhasilan teknis, namun minimnya pemahaman petani menunjukkan lemahnya partisipasi akar rumput. Kolaborasi lebih bersifat top-down dan eksklusif, didominasi oleh aktor level atas. Hal ini bertengangan dengan prinsip dasar collaborative governance yang menekankan inklusivitas dan keterlibatan setara antar pemangku kepentingan.	Dampak kondisi ini adalah menurunnya kepercayaan dan partisipasi petani, sehingga pemberdayaan lokal terhambat dan program berisiko kurang efektif serta tidak berkelanjutan.

Sumber : Hasil Analisis Oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel yang telah disajikan oleh peneliti tersebut dapat dijelaskan bahwa kolaborasi yang terjadi pada pelaksanaan program PAT masih mengalami beberapa kekurangan baik dari kolaborasi yang belum partisipatif dan cenderung eksklusif, kolaborasi yang terbangun hanya didominasi oleh aktor level atas, juga adnaya beberapa egosektoral yang memunculkan kesenjangan dari sebagian petani di Kabupaten Tuban.

Proses tata kelola kolaboratif menurut (Balogh 2012) dalam pelaksanaan program pompanisasi dan perluasan areal tanam di Kabupaten Tuban terdiri dari beberapa tahapan utama yang membentuk dinamika interaksi antara para aktor lintas sektor. Collaborative governance merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam mengukur kerjasama antara stakeholder yang terkait dalam memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui satu organisasi sendiri (Fatimah, P et al, 2021). Tahapan Collaborative governance bersifat non-linear dan sering kali berulang tergantung pada konteks dan tantangan yang muncul. Tahapan tersebut mencakup gambaran bagaimana berbagai aktor dari berbagai sektor dapat bekerja sama secara deliberatif untuk mencapai tujuan bersama dalam mengoptimalkan program pompanisasi dan perluasan areal tanam di Kabupaten Tuban.

a. Dinamika Kolaborasi

1. Komunikasi

Menurut (Balogh, 2012) komunikasi merupakan bagian yang sangat sentral dalam konteks *collaborative governance*. Komunikasi adalah fondasi utama dalam membangun dan menjaga kolaborasi yang efektif antar aktor yang berbeda. Berdasarkan teori kolaborasi oleh Balogh, 2012 ditemukan bahwa komunikasi tidak berjalan secara optimal karena keterbatasan jumlah penyuluhan yang dibandingkan

dengan kelompok dan tani dan para petunia di Kabupaten Tuban yang digambarkan dalam grafik berikut:



Gambar 3. Grafik Perbandingan Jumlah Penyuluhan, Kelompok Tani dan Petani di Kabupaten Tuban Tahun 2017

Sumber : BPS Kabupaten Tuban

Berdasarkan grafik tersebut, jumlah penyuluhan pertanian sejumlah 146 Orang, Kelompok tani sebanyak 1.837 kelompok dengan total anggota sebanyak 205.643 orang. Sehingga dapat dilihat kesenjangan antara jumlah penyuluhan pertanian dengan kelompok tani serta petani. Apabila ditinjau dari segi rasio perbandingan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 1 penyuluhan harus menangani 1.409 petani. Karena keterbatasan tenaga kerja dari penyuluhan pertanian, maka banyak terjadi miskomunikasi yang mungkin terjadi sehingga informasi tidak tersampaikan secara merata.

2. Kepercayaan

Menurut (Balogh, 2012), Kepercayaan adalah komponen kunci dalam keberhasilan tata kelola kolaboratif. Balogh menekankan bahwa kepercayaan adalah prasyarat penting untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Kepercayaan dapat dibangun menggunakan komunikasi yang terbuka, pengalaman bersama, serta interaksi seimbang yang memungkinkan pihak-pihak berbeda untuk melakukan kerja sama walaupun memiliki perbedaan pandangan dan juga kepentingan. Berdasarkan temuan di lapangan terdapat bahwasanya banyak dari para petani yang memiliki rasa kurang percaya dengan pemerintah terkait pelaksanaan program. Karena sebagian besar program hanya dipusatkan pada satu titik. Hal tersebut yang menyebabkan ketimpangan antar daerah yang merasa dibedakan dengan yang lain.

3. Komitmen

Menurut (Balogh, 2012), Komitmen merujuk pada kesediaan dan tekad para aktor untuk secara aktif terlibat, bertahan dalam proses kolaborasi, dan bekerja menuju tujuan bersama meskipun menghadapi tantangan atau konflik. Pada aspek komitmen dalam proses kolaborasi pada pelaksanaan program

pompanisasi dan perluasan areal tanam bagi petani yang telah disampaikan oleh informan, program pompanisasi ini berkomitmen bersama untuk meningkatkan indeks pertanaman yang didukung dengan adanya peningkatan luas tambah tanam untuk meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Tuban. Selain itu, adapun data dari hasil temuan penelitian mengenai luas lahan dan tanam padi di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang disajikan oleh peneliti dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik Luas lahan dan Tanam Padi di Kecamatan Plumpang Tuban Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban

Berdasarkan grafik yang disajikan penulis menrangkakan bahwa jumlah tanam padi di Kabupaten Tuban khususnya di Kecamatan Plumpang relatif mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Sedangkan untuk hasil indeks pertanaman yang berfungsi untuk meningkatkan luas tambah tanam di Kabupaten Tuban dapat digambarkan pada grafik berikut:



Gambar 5. Grafik Indeks Pertanaman di Kecamatan Plumpang, Tuban Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban

Berdasarkan data yang disajikan penulis bahwa indeks pertanaman yang ditargetkan dalam program pompanisasi dan perluasan areal tanam cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya komitmen antar stakeholder dalam proses kolaborasi sehingga tujuan yang diharapkan masih belum bisa tercapai.

4. Sumber Daya

Menurut (Balogh, 2012) sumber daya dapat dipahami sebagai segala bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk menciptakan proses kolaboratif yang

efektif. Sumber daya mencakup berbagai bentuk dukungan yang dibutuhkan dalam berkolaborasi baik dari finansial, pengetahuan maupun distribusi yang adil untuk menjamin keberhasilan dan legitimasi proses kolaboratif. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwa para stakeholder level bawah masih belum menerima sumber daya secara maksimal, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah dari aliansi yang diberikan dalam program pompanisasi dan perluasan areal tanam sehingga sebagian dari para petani yang merupakan stakeholder sasaran menyewa material yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktifitas pertanian. Selain itu, berdasarkan dari hasil informasi yang didapatkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat koordinasi yang kurang bagus antar para kelompok tani karena banyak petani biasa yang merasa tidak tahu akan adanya program tersebut. Selain itu, jumlah bantuan pompa yang diberikan juga belum mampu memberikan hasil yang optimal karena jumlahnya yang terbatas.

b. Tindakan-Tindakan Kolaborasi

1. Memfasilitasi

Menurut (Balogh, 2012) memfasilitasi adalah mengelola dan mendukung proses kolaboratif secara aktif agar semua pihak bisa berpartisipasi secara setara dan efektif. Memfasilitasi dapat berupa tindakan aktif dalam mendukung proses kolaboratif agar berjalan inklusif, terarah dan produktif melalui pengelolaan komunikasi, hubungan antar pihak, serta penguatan kepercayaan dan komitmen. Dari pernyataan yang telah diberikan oleh informan, menjelaskan bahwa kegiatan memfasilitasi yang diberikan baik berupa penyuluhan ataupun sosialisasi adanya program PAT tidak merata, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan jumlah penyuluhan pertanian sehingga tidak bisa menjangkau ke seluruh petani yang ada di setiap kecamatan.

Ketidaksampaian informasi inilah yang nanti akan menimbulkan miskomunikasi yang relatif mempengaruhi proses kolaborasi pada pelaksanaan program pompanisasi dan perluasan areal tanam di Kabupaten Tuban. Pada proses kolaborasi oleh stakeholder level atas berjalan dengan baik sesuai dengan himbauan dan arahan dari petunjuk teknis, namun dalam kenyataannya masih banyak para petani yang merasa belum difasilitasi dengan baik pada pelaksanaan program PAT. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dalam pelaksanaan program PAT sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kesalahpahaman dan ketidak tahuhan para petani karena kurangnya komunikasi antar para petani.

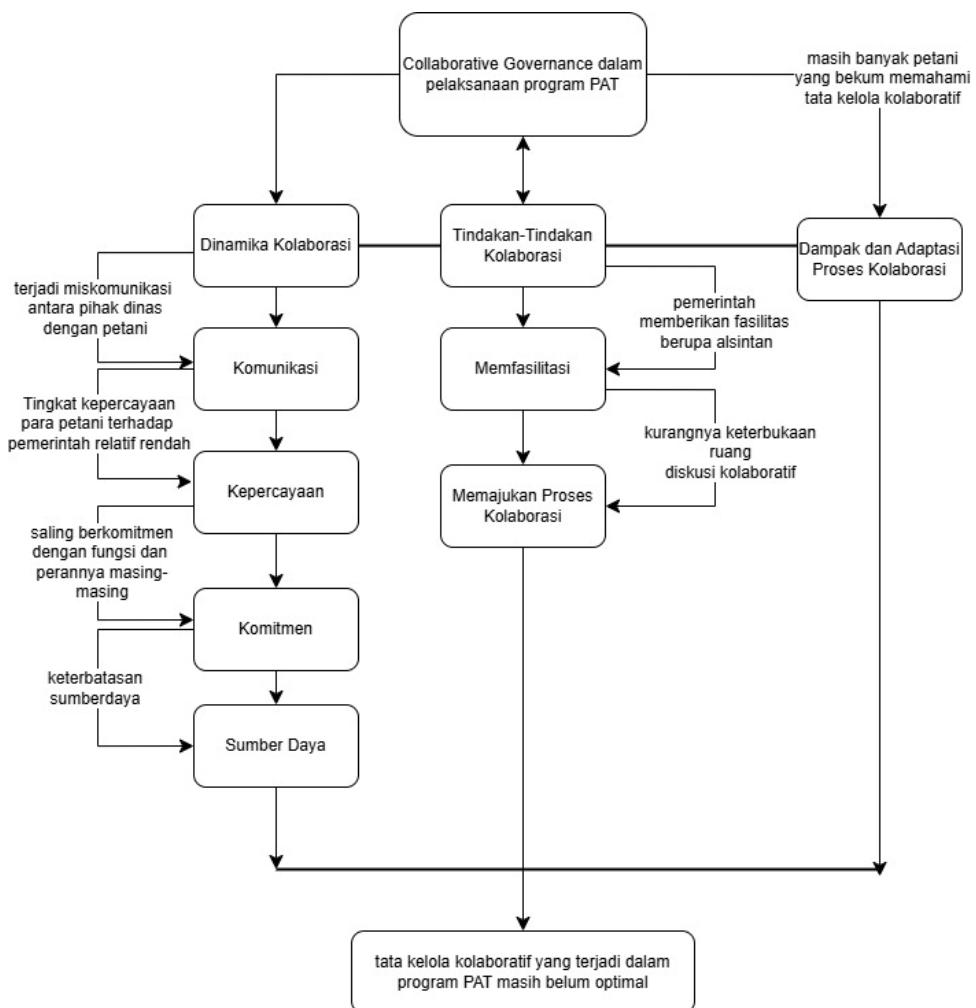
2. Memajukan Proses Kolaborasi

Menurut (Balogh, 2012), memajukan proses kolaborasi merupakan proses mendorong, menjaga, dan mengembangkan dinamika kerja sama antar aktor agar proses kolaboratif tetap berjalan secara efektif dan menghasilkan keputusan

bersama yang bermakna. Memajukan proses kolaborasi dapat diartikan sebagai upaya aktif untuk mendorong partisipasi, mengatasi hambatan, menjaga komitmen, dan menciptakan kemajuan nyata dalam proses kerja sama lintas sektor. Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa para stakeholder yang bersangkutan sudah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan program PAT. Namun karena keterbatasan informasi sehingga menyebabkan para petani dan anggota HIPPA belum berpartisipatif secara optimal.

c. Dampak dan Adaptasi Proses Kolaborasi

Menurut (Balogh, 2012), Dampak adalah hasil nyata dari kolaborasi (baik kebijakan maupun hubungan sosial), sedangkan adaptasi adalah kemampuan proses kolaboratif untuk berkembang dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tantangan, demi keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang. Dari adanya proses kolaboratif ini, para stakeholder dapat saling membantu dan juga meningkatkan efisiensi dalam menangani masalah yang ada. Dari hasil informasi yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa dampak dan adaptasi hanya berimbang pada DKP2P Kabupaten Tuban, Kodim, Dinas PUPR, BPP, dan sebagian kelompok tani. Sedangkan untuk sebagian para petani dan HIPPA tidak menerima dampak dan adaptasi yang optimal dari keberlangsungan program. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diberikan kepada para petani yang berbanding lurus dengan sumber daya manusia petani yang relatif rendah sehingga proses kolaborasi berlangsung kurang optimal. Berdasarkan hasil informasi yang didapat oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dampak proses kolaborasi dapat mempengaruhi efisiensi keberlangsungan program PAT ini. Adapun juga flowchart dari hasil pembahasan yang digambarkan oleh penulis sebagai berikut:



Gambar 6. Flowchart dari collaborative governance dalam pelaksanaan program PAT

Sumber : Data hasil olahan peneliti, 2025

Berdasarkan gambar flowchart yang disajikan oleh peneliti menjelaskan bahwa kolaborasi dalam pelaksanaaan program pompanisasi dan perluasan areal tanam di Kabupaten Tuban masih mengalami beberapa temuan penelitian yang menghambat tujuan dari keberlangsungan program. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum partisipatif dan cenderung eksklusif pada pelaksanaanya. Dengan adanya fenomena tersebut, sebagian dari para petani di Kabupaten Tuban belum merasakan manfaat dan dampak dari adanya program tersebut secara optimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program pompanisasi dan perluasan areal tanam di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor belum sepenuhnya berjalan efektif dan inklusif. Berdasarkan teori *Collaborative Governance* dari Balogh (2012), ketidakefektifan ini terlihat dari lemahnya komunikasi, rendahnya kepercayaan, komitmen yang belum merata, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia, khususnya pada level petani sebagai stakeholder utama. Kolaborasi yang masih didominasi oleh aktor pemerintah dan militer menyebabkan proses tata kelola cenderung top-down, sehingga prinsip partisipatif dan kesetaraan belum tercapai. Secara teoritis, temuan ini mengonfirmasi bahwa tata kelola kolaboratif tidak hanya

membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tetapi juga prasyarat penting seperti komunikasi yang intensif, fasilitasi yang adil, serta adaptasi dan respons terhadap dinamika lokal.

Ketidakterpenuhinya aspek-aspek ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan efektivitas kolaborasi untuk peningkatan produksi tanaman pangan di tengah tantangan perubahan iklim. Agar implementasi program pompanisasi dan perluasan areal tanam berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan aspek-aspek fundamental dalam tata kelola kolaboratif sebagaimana dikemukakan oleh Balogh (2012), yakni komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan distribusi sumber daya. Pertama, kapasitas komunikasi horizontal dan vertikal perlu diperbaiki melalui peningkatan rasio penyuluhan terhadap petani, disertai penguatan sistem diseminasi informasi berbasis komunitas.

Hal ini penting untuk mengatasi asimetri informasi dan membangun pemahaman bersama di antara aktor. Kedua, penciptaan ruang deliberatif seperti forum petani-partisipatif perlu difungsikan secara reguler agar proses perumusan dan evaluasi program tidak bersifat top-down, melainkan berbasis kebutuhan lokal. Ketiga, mekanisme distribusi sumber daya harus diarahkan pada prinsip keadilan kolaboratif, dengan alokasi berbasis data kebutuhan riil dan transparansi antar aktor. Terakhir, evaluasi kolaborasi sebaiknya dilakukan secara iteratif dengan pendekatan partisipatif untuk memastikan bahwa dinamika dan adaptasi program selaras dengan kondisi ekosistem sosial dan lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga fungsional dalam menciptakan ketahanan pangan yang inklusif dan resilien.

REFERENSI

- Anggara, S. (2016). Ilmu Adminsitras Negara. In B. A. Saebani (Ed.), *Cv Pustaka Setia* (Cetakan Ke). CV.PUSTAKA SETIA.
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance.*Collaborative Govenance Dalam Perspektif Publik*, 161.
- BPS Kabupaten Tuban. (2024). *Katalog/ Catalog: 9302021.3523* (14th ed.). Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. <https://tubankab.bps.go.id/publication/2024/04/04/ba8b533e0300c67168b53864/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-tuban-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html>
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan P. K. T. (2021). *Rencana Strategis DKP2P (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan) Kabupaten Tuban*.
- Heri. (2024). Luas Panen dan Produksi Padi Turun, Pemkab Tuban Optimalkan Lahan Tadah Hujan. *Tubankab.Go.Id*. <https://tubankab.go.id/entry/luas-panen-dan-produksi-padi-turun-pemkab-tuban-optimalkan-lahan-tadah-hujan-jdih.tubankab.go.id>. (2021). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 18 TAHUN 2021* (p. 6). Pemerintah Kabupaten Tuban.
- Kariem, M. Q., & Afrijal, A. (2021). Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(3), 107-114. <https://doi.org/10.36982/jpg.v6i3.1777>

Kementerian Pertanian. (2021). Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021. *Kementerian Pertanian* 0-161.
<https://bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2023/10/RENSTRA-KEMENTAN-2020-2024-REVISI-2-26-Agt-2021.pdf>

Nugraha, B., Purnamaningsih, P. E., Wiwin, K., Wismayanti, D., Martiawan, R., Sumiati, I., Maesarini, I. W., Firdausijah, R. T., Kunda, A., Kusnadi, I. H., & Hendrayady, A. (2022). *Budi Nugraha, Teori administrasi*, Desember 2022.

Nursyamsi, D., Munifah, S., Pradini, S., Muis, R. A., Risnawati, Nofrizal, Y., Iskandar, D., Nurlianie, Trishanti, A., Fepriningrum, R., Cahayatullah, N., & Fuad, M. (2021). *Data Statistik SDM Penyuluhan Pertanian Tahun 2021*. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian.
https://bppsmp-ppid.pertanian.go.id/doc/19/01-Buku_Penyuluhan.pdf

Yolency. (2024). Program Pompanisasi dan Perluasan Areal Tanam, Tim Wasmonev : Wujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Maju dan Sejahtera. *Tubankab.Go.Id.* <https://tubankab.go.id/entry/program-pompanisasi-dan-perluasan-areal-tanam-tim-wasmonev-wujudkan-swasembada-pangan-menuju-indonesia-maju-dan-sejahtera>